

*Kapita
Selekta*
**PSIKOLOGI
BENCANA**

EDISI KEDUA

Kata Pengantar:
Prof. Jatie K. Pudjibudojo

editor:
**Listyo Yuwanto
Fatimah A. Mauladdawilah**



SAC
Fakultas Psikologi
Universitas Sebelas Maret



ILS+

TAS
YA
KAN
5

RC 114142-02

Edisi Kedua

KAPITA SELEKTA PSIKOLOGI BENCANA

Reg. Comp : 114142.02/S/2017
Call Number : 155.935 KAP K
Proses tgl. : Sept '17

Editor

Listyo Yuwanto

Fatimah A. Mauladdawilah

Kata Pengantar

Prof. Jatie K. Pudjibudojo



KAPITA SELEKTA PSIKOLOGI BENCANA

Editor : Listyo Yuwanto & Fatimah A. Mauladdawilah
Desain Sampul : Fatimah A. Mauladdawilah & Listyo Yuwanto
© 2017, Dwiputra Pustaka Jaya

Diterbitkan oleh:

Dwiputra Pustaka Jaya
Star Safira-Nizar Mansion E4 No.14
Sidoarjo - 61265
Telp: 085-58414756
e-mail: dwiputra.pustaka@gmail.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-6604-03-3



Sanksi Pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pengembangan ilmu pengetahuan tidak boleh menjauhkan masyarakat dari kultur dan identitas yang melingkupinya. Pengetahuan yang dikembangkan haruslah dapat dipahami oleh awam sehingga tidak terasing dan mengasingkan. Karenanya adalah menjadi tugas para psikolog untuk dapat memainkan fungsi moderasi dan fasilitasi tersebut.

Psikolog dalam rangka indigenisasi ini idealnya adalah sebagai pendamping sekaligus teman belajar yang baik bagi masyarakat, sebagai fasilitator dalam menggali khazanah nilai, norma, kearifan pengetahuan yang dimilikinya, untuk kemudian digunakan dalam menjawab problem dan tantangan yang dihadapinya. Pentingnya pendidikan kebencanaan merupakan tantangan, apakah psikologi siap mengelola bencana manusia, mengkaji psikologi dan budaya pasca bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat terdampak bencana dengan berbasis kearifan lokal. Indigenisasi ilmu sosial, urgen untuk terus dikembangkan di berbagai bidang kajian termasuk psikologi bencana yang membumikan khazanah pengembangan psikologi bencana di Indonesia.

Journey of thousand miles begins with a single step (Lao Tsu). Selamat, apresiasi yang tinggi kepada para penulis, khususnya Listyo Yuwanto sang penggagas, untuk semangat serta ide-idenya mewadahi para penulis berbagi berbagai hal terkait kebencanaan melalui "Kapita Selekt Psikologi Bencana Edisi Kedua" ini dalam upaya pengembangan Psikologi Kebencanaan di Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar <i>Prof. Jatie K. Pudjibudojo</i>	iii
Kata Pengantar Editor	v
Daftar Isi	vii
Pentingnya Pendidikan Kebencanaan	
<i>Listyo Yuwanto</i>	1
Mitigasi Psikologis Bencana Melalui Pelatihan Logo analisis	
<i>Nurul Hidayah</i>	21
Bencana Manusia: Apakah Psikologi Siap Blusukan untuk Mengelola?	
<i>Hendro Prabowo & Mahargyantari Purwani Dewi</i> ...	39
Penanganan Psikologis Penyintas Konflik Sampang	
<i>Listyo Yuwanto & Cyntia Maria Poedjianto Adi</i>	57
Meaning Making Sebagai Metode Coping untuk Disaster Survivor	
<i>Vivian Halim</i>	75
Antara Kutukan dan Buaya Terhadap Konflik di Tanah Timor Timur	
<i>Philia C. Octavianus</i>	95
Social Disaster Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam di Situbondo	
<i>Feranika Diah Palupi</i>	113
Disaster Psychology: Indonesia dan Mei 1998	
<i>Sofia Ramdhaniar</i>	127

Kajian Psikologi dan Budaya Pasca Bencana Longsor di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali Tahun 2017 <i>Gusti Ayu Ryana Mahasari</i>	137
Tragedi Sampit Ditinjau dari Disaster Psychology <i>Ledy Mawaddah</i>	153
Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kearifan Lokal Di Daerah Jawa, Aceh, dan Mentawai) <i>Evi Syafrida Nasution</i>	169
Refleksi Kasus Mei 1998 : Diskriminasi Keturunan Tionghoa, Kami Juga Rakyat Indonesia <i>Cicilia Hendarto</i>	195
Sedekah Bumi Desa Sawo Dari Penolak Hujan Badai Hingga Pererat Tali Persaudaraan <i>Wahyu Puspita Rini</i>	209
Memfaatkan Program Earthquake 3D Sebagai Media Pendidikan Kebencanaan <i>Listyo Yuwanto</i>	223
Biografi Penulis	271

MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI KEARIFAN LOKAL DI DAERAH JAWA, ACEH, & MENTAWAI)

Evi Syafrida Nasution

Fakultas Psikologi Universitas Borobudur
Email: evi_syafrida@yahoo.com

Pendahuluan

Indonesia terletak di jalur lingkaran api (*ring of fire*) yang memiliki sejarah panjang bencana alam. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, yang masing-masing daerahnya memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda. Misalnya, pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh mengalami gempa dan tsunami yang dahsyat (Suryana, 2016). Mentawai mengalami gempa bumi pada 25 Oktober 2010 lalu. Gempa dan tsunami memporak-porandakan kawasan pantai barat Pulau Pagai, dan Sipora (Nugroho,

2011). Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 dengan daerah yang terdampak yaitu Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali (Zamroni, 2011).

Bencana terjadi karena adanya ancaman, dampak, dan kerentanan. Bencana dapat mengancam semua wilayah di Indonesia baik wilayah daratan, pegunungan, maupun wilayah pesisir (Hilmi, dkk., 2012). Bencana alam dapat memberikan dampak dalam menghilangkan mata pencaharian masyarakat serta penurunan ekonomi lokal. Modal natural, finansial, fisik, manusia, dan sosial terkikis sehingga pasar menjadi kacau dan efek dari ini semua adalah terganggunya kondisi sosial serta ekonomi wilayah yang terdampak (FAO & ILO, 2009 dalam Wijayanti, 2013).

Indonesia telah banyak belajar dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Hal ini terlihat dengan bergesernya paradigma bencana yang berfokus pada tanggap darurat menjadi mitigasi bencana (UU No.24 Tahun 2007 dalam Suryana, 2016). Akan tetapi, pengetahuan masyarakat yang telah turun temurun hidup menyesuaikan diri dengan alam tidak dapat diabaikan begitu saja. Secara tidak sadar upaya pengurangan resiko bencana sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu melalui kearifan lokal (*local wisdom*) masing-masing daerah atau dikenal juga dengan *indigenous knowledge* (Suryana, 2016).

Penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tahap-tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekonstruksi. Mitigasi/PRB esensinya pada serangkaian aktivitas mengurangi risiko bencana (dampak bencana) dan strategi mitigasi satu langkah proses manajemen bencana (Astuti & Sudaryono, 2010). Adapun kerangka berpikir yang dikembangkan dalam upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi, meliputi 4 kerangka konseptual, yaitu: (1) *Awareness* (perubahan



perilaku); (2) *Knowledge Development* (salah satunya pendidikan dan pelatihan); (3) *Public Commitment*; (4) *Risk Assessment*. Berangkat dari kerangka konseptual pertama, yaitu membangun kesadaran PRB, sehingga terjadinya perubahan perilaku dan budaya sangat mendasar untuk dikaji lebih lanjut (Sugeng, 2008 dalam Astuti & Sudaryono, 2010). Untuk mengurangi risiko bencana, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana upaya tersebut dilakukan. Mengurangi risiko bencana dapat diartikan dengan (Sarwidi, <https://www.academia.edu/7823991/>) : (1) Mengurangi bahaya (tidak selalu bisa); (2) Mengurangi kerentanan; (3) Meningkatkan kapasitas.

Sebagaimana hasil Seminar Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Bappenas, Yogyakarta 24 Maret 2007, sudah saatnya semua pihak mendukung perubahan paradigma yang melandasi *Platform RAN-PRB*, yang secara garis besar memiliki tiga rencana yakni (Sudaryono & Astuti, 2010): Strategi yang dikembangkan untuk RAN-PRB membutuhkan kerja keras yang bersifat struktural, holistik dan kontekstual. Artinya, secara struktural, paradigma yang dirancang merupakan satu kerja sistematis antar kepentingan global, regional, dan nasional, yang dalam prosesnya saling tergantung satu sama lain, dan dapat dilakukan secara koordinatif. Demikian pula sifat kerja yang dilakukan pada setiap tataran harus bersifat holistik bukan parsial, sehingga hasilnya benar-benar optimal dalam upaya PRB. Sementara itu secara kontekstual, program-program yang dirancang dalam upaya PRB perlu memperhatikan dimensi demografis, sosial-budaya, dan ekonomi masyarakat.

Prinsip tersebut sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang sangat rawan bencana dan di sisi lain memiliki sifat masyarakat yang pluralistik. Dukungan masyarakat

terhadap RAN-PRB sangat penting, karena paradigma yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap kerja yang bermakna kemanusiaan. Selain itu, PRB merupakan salah satu bentuk kesadaran yang tinggi untuk menghargai eksistensi manusia. Hal yang penting adalah program tersebut sebagai bagian dari ratifikasi 168 negara termasuk Indonesia tentang *Hyogo Framework for Action 2005-2015* (HFA), yang berkomitmen untuk penurunan secara berarti hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi, dan lingkungan karena bencana yang dialami oleh masyarakat dan negara. Keberhasilan rencana tersebut akan sangat tergantung pada komitmen politik dan keterlibatan aktif masyarakat luas termasuk perguruan tinggi sebagai salah *stakeholders* dalam rencana aksi yang dimaksud (Astuti & Sudaryono, 2010).

Salah satu prioritas aksi dalam HFA 2005-2015 adalah peringatan dini yang perlu digali terus menerus, baik dari segi teknologi maupun budaya masyarakat setempat, yang secara historis sudah mempunyai cara-cara penyelamatan. Paling tidak, terdapat dua hal penting dalam peringatan dini (Astuti & Sudaryono, 2010), yaitu:

1. Cara bertindak setelah mendapatkan peringatan dan sistem yang mendukung pelaksanaan yang efektif para pengambil keputusan di sekolah maupun di masyarakat
2. Memastikan bahwa tindakan yang cepat dan terkoordinir diambil pada waktu keadaan darurat (Wuryanti, 2007 dalam Astuti & Sudaryono, 2010).

Sistem peringatan dini secanggih apapun sangat tergantung kesadaran akan masyarakatnya untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana. Akhirnya, kerentanan sosial-personal (psikososial) menjadi penting untuk dikaji dan ditingkatkan SDM-nya.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) harus disosialisasikan pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia adalah daerah rawan bencana. Untuk itulah upaya pemerintah untuk melakukan PRB sudah diperkuat dengan diterbitkannya undang-undang tentang penanggulangan bencana. Namun demikian, belum dipahami secara optimal oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan, dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak manusia. Upaya mengatasi masalah bencana belum banyak dilakukan secara sistematis dan *suistenable*, sehingga korban bencana masih menunjukkan angka-angka yang relatif tinggi (Astuti & Sudaryono, 2010).

Sesuai dengan UU RI No. 24/2007, penanggulangan bencana di Indonesia berlandaskan pada Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), serta berasaskan pada kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan-keselarasan-keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi. Berdasarkan undang-undang tentang penanggulangan bencana tersebut, tujuan penanggulangan bencana di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakwanaan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sarwidi, <https://www.academia.edu/7823991/>)

Salah satu contoh budaya lokal dari masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu masyarakat Jawa memiliki sejumlah kearifan lokal. Begitu pula dengan filsafat kehidupan masyarakat Jawa yang menekankan aspek harmoni, ketentraman, dan kenyamanan, merupakan bagian dari usaha secara sinergis untuk pengurangan risiko bencana. Sampai saat ini, di kalangan *kejawen* masih terus memegang teguh kearifan lokal yang merupakan warisan nenek moyang dengan melakukan sejumlah ritual agar tidak terjadi bencana. Bencana bagi komunitas *kejawen* merupakan cermin ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam. Manusia banyak melakukan perbuatan yang sembrono, sehingga alam "murka". Sementara itu, kaum santri memaknai bencana sebagai sesuatu (ujian, cobaan atau adzab) yang datang dari Allah, namun manusia mempunyai kontribusi terhadap terjadinya bencana di muka bumi ini. Komunitas santri memaknai bencana didasarkan pada sumber hukum Islam yang utama (Alquran dan Hadits). Oleh karenanya, mereka melakukan pendampingan dan pemberdayaan komunitas sosial dengan menggunakan epistemologi normatif yang dipadukan dengan pengetahuan ilmiah. Teknik dan metodologi yang digunakan juga menganut pada model-model kegiatan yang bersifat partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA) maupun *Rapid Rural Appraisal* (RRA).

Basis epistemologi yang berbeda dalam memandang bencana menjadikan makna dan arti bencana bagi dua komunitas (kejawan dan santri) juga berbeda. Implikasi teoritiknya adalah proses keragaman yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmoni. Bahan dalam penanggulangan bencana potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat harus mampu bergerak secara optimal untuk memulihkan keadaan seperti semula. Jika dalam setiap komunitas, terutama yang berada di daerah rentan bencana mempunyai program untuk PRB, maka kesadaran masyarakat akan semakin tinggi terhadap ancaman bencana. Jika kesadaran tinggi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana cukup kuat, maka kerentanan semakin kecil (Zamroni, 2011).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bertujuan untuk menggali kearifan lokal terkait bencana pada masyarakat yang terdampak yang nantinya dapat dimodifikasi dengan ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam melancarkan proses penanggulangan bencana.

Kajian Teori

Bencana Alam

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terjadi karena adanya ancaman, dampak, dan kerentanan. Bencana dapat mengancam semua wilayah di Indonesia baik daratan, pegunungan maupun pesisir (Hilmi, dkk.,

2012). Salah satu bencana alam yaitu gunung api. Gunung api yang masih aktif di Indonesia berjumlah 129 gunung, 70 di antaranya dikategorikan sangat mengancam. Gunung api ini membentang sepanjang 7.000 Km dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera, dan Sulawesi.

Penerapan Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia

UU RI No. 24/2007 adalah landasan bagi pembentukan sistem (*system building*) penanggulangan bencana di Indonesia. Sistem penanggulangan bencana tersebut terdiri atas beberapa subsistem, yaitu legislasi, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyelenggaraan (dalam Sarwidi, <https://www.academia.edu/7823991/>). Penjelasan subsistem-subsistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Legislasi. Serangkaian perundangan dan peraturan sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan penanggulangan bencana yang optimal, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Di tingkat nasional, setelah UU RI No. 24/2007 diterbitkan, serangkaian peraturan turunannya yang sudah dan harus dibentuk antara lain: serangkaian peraturan pemerintah (PP), peraturan Presiden (Perpres), serta peraturan menteri (Permen) atau peraturan kepala lembaga (Perka). Serangkaian UU perlu dibuat dan disinkronkan antara lain yang terkait dengan penataan ruang. Salah satu dasar legislasi krusial diterbitkan sebagai turunan implementasi UU No. 24/2007 adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peraturan pemerintah (PP) yang sudah maupun yang masih perlu dibuat adalah yang terkait dengan peran lembaga usaha

- dan internasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana, misalnya yang terkait dengan rehabilitasi, rekonstruksi, dan kemudahan akses. Peraturan presiden (Perpres) yang sudah dan yang akan disusun antara lain adalah pembentukan BNPB serta penentuan status bencana dan tingkatan bencana. Permen yang diperlukan misalnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2008 (Permendagri No. 26/2008) tentang Pedoman Organisasi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Kelembagaan. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan di tingkat nasional, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai Perpres No. 8/2008 tentang BNPB. Segera setelah terbentuknya BNPB, pemerintah daerah berkewajiban membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB sesuai dengan Permendagri No. 26/2008 tentang Pedoman Organisasi serta Tata Kerja BPBD tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Badan Penanggulangan Bencana (BNPB dan BPBD) terdiri atas unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah terdiri atas unsur pengarah dari masyarakat profesional BNPB, dipilih melalui proses seleksi yang ketat yang ujungnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk diserahkan kepada Presiden guna mendapatkan surat pengangkatan.
 3. Pendanaan. Biaya untuk mendukung kegiatan rutin BPB (Badan Penanggulangan Bencana: BNPB/BOBD) berasal dari DIPA yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD). Dalam keadaan

- kritis bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat secara individu maupun lembaga, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, baik tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Perencanaan. Agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan maksimal, perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu sangat diperlukan, yaitu melalui pemaduan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan kegiatan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, baik yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP), Rencana Jangka Menengah (RM), maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Komitmen penanggulangan bencana dituangkan dalam dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Secara nasional, dokumen perencanaan penanggulangan bencana dibuat dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) oleh Pemerintah/BNPb, misalnya Renas PB 2010-2014 (BNPb, 2010a; dalam Sarwidi, 2010) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) PRB oleh Pemerintah dan Platform Nasional (Planas) sebagai perwakilan dari masyarakat pelaku PB/PRB di tingkat nasional, misalnya RAN PRB 2010-2012 (BNPb dan Bappenas, 2010 dalam Sarwidi, 2010). Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Kementerian/Kelembagaan (K/L), dibuatlah rencana penanggulangan bencana sektoral di K/L terkait. Di tingkat provinsi, dokumen perencanaan penanggulangan bencana dibuat dalam bentuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)/BPBD, serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB Provinsi oleh Pemprov/BPBD, dan Forum PRB di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot/BPBD)

- Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Pemkab/Pemkot dan Forum PRB di tingkat kabupaten/Kota.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu asas penanggulangan bencana di Indonesia adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal. Dengan demikian, proses penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana dapat dipermudah dan dipercepat (Kemenristek, 2007 dalam Sarwidi, 2010). Dalam praktek, unsur seni ataupun budaya juga menentukan kelancaran dan keberhasilan penanggulangan bencana. Dengan demikian, IPTEK dalam penanggulangan bencana dimodifikasi menjadi IPTEKS, karena memasukkan unsur S (seni atau kebudayaan), misalnya dalam memasukkan secara tepat unsur kearifan lokal dan budaya atau karakteristik masyarakat lokal. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa penerapan unsur S dalam penanggulangan bencana oleh masyarakat dengan pendekatan yang bertentangan dengan logika yang berujung pada hambatan dan bahkan kegagalan penanggulangan bencana telah banyak ditemui, demikian pula yang sebaliknya.
 6. Penyelenggaraan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan siklus bencana yang secara garis besar terdiri atas tiga tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. BNPB/BPBD bertindak selaku koordinator dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dan pasca bencana. BNPB/BPBD menjalankan fungsi komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat.

Masyarakat yang Terdampak Bencana Alam

Masyarakat pada kawasan bencana, karena potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut dapat memberikan penghidupan. Pada kawasan rawan bencana gunung api misalnya, alasan yang membuat masyarakat tetap tinggal adalah karena tanah di sekitar gunung tersebut subur dan terdapat sumber air bersih yang baik bagi kehidupan masyarakat lokal. Potensi wilayah dapat menyeimbangkan bahaya yang terdapat di dalam wilayah tersebut sehingga masyarakat berkeputusan untuk tidak pindah dari daerah bencana meski daerah tersebut berbahaya. Ada empat opsi tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk hidup dengan risiko bencana (Kelman & Mather, 2008 dalam Zamroni, 2013), antara lain:

1. Tidak melakukan apapun (*do nothing*)
2. Melindungi masyarakat dari bahaya (*protect the society from hazard*)
3. Menghindari bencana (*avoid hazards*)
4. Hidup dengan bahaya dan risiko (*live with the hazards and risks*).

Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah metode dalam pekerjaan sosial yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia di komunitas dengan menggunakan prinsip partisipasi sosial. Pengembangan Masyarakat

dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan, masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu menambah pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Siahaya, dkk. 2006). Fokus pengembangan masyarakat adalah upaya menolong warga masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara khusus, pengembangan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau tertindas, baik karena keyakinan atau pun karena diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ras atau suku, gender, usia, atau kondisi kecacatan (Siahaya, dkk. 2006).

Setiap upaya pengembangan masyarakat harus didasari atas beberapa prinsip-prinsip (Siahaya, dkk. 2006), antara lain:

- a. Prinsip-prinsip ekologis: holistik, keberlangsungan/kebertahanan, keragaman, perkembangan organis, dan perkembangan yang seimbang.
- b. Prinsip-prinsip keadilan sosial: mengaitkan dengan ketidakadilan struktural, berbicara tentang ketidakadilan kekuasaan, pemberdayaan, batasan kebutuhan, dan hak asasi manusia.
- c. Prinsip menghargai kearifan lokal: menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan lokal, menghargai sumber-sumber lokal, menghargai keterampilan lokal, dan menghargai proses lokal.
- d. Prinsip-prinsip proses: 1. Proses, hasil, dan visi; 2. Menumbuhkan kesadaran; 3. Partisipasi; 4. Kerjasama dan konsensus; 5. Kecepatan perkembangan; 6. Damai dan non-kekerasan; 7. Inklusivitas.
- e. Prinsip global dan lokal

Kearifan Lokal Masyarakat di Indonesia

Dalam kamus Inggris Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004 dalam Daulay, 2013). Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007 dalam Daulay, 2013). Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi.

Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan'. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan harmonis. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Pada akhirnya, kearifan lokal dijadikan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, yang

meliputi seluruh unsur kehidupan agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka (dalam Daulay, 2013).

Berikut ini beberapa contoh kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana alam:

1. Masyarakat Jawa

Selain gempa bumi dan tanah longsor, DIY dan Jawa Tengah mempunyai ancaman bencana letusan Gunung Merapi. Gunung Merapi yang ada di sekitar Kabupaten Sleman termasuk salah satu gunung yang sangat aktif bahkan dikategorikan sebagai gunung yang teraktif di dunia karena periodisitas dan intensitas letusannya cenderung pendek yaitu tiga sampai tujuh tahun (Zamroni, 2011).

Kebanyakan penduduk hidup di sekitar gunung, khususnya di sekitar gunung api aktif. Masyarakat di perbukitan Gunung Merapi umumnya hidup di lereng-lereng yang curam dan rentan terjadi longsor. Hal ini masih diperparah dengan kondisi sebagian masyarakat yang berada pada garis kemiskinan dan ekonomi subsistensi. Lemahnya kapasitas warga menjadikan kerentanan semakin tinggi. Oleh karenanya, jika terjadi guncangan atau bencana sekecil apapun warga akan mudah sekali terperosok dalam ketidakberdayaan (*exposure*). Tingginya kerentanan masyarakat akan menyebabkan dampak dari letusan gunung Merapi semakin berat dirasakan oleh masyarakat, bahkan juga terenggutnya nyawa (Zamroni, 2011).

Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 telah menyebabkan hampir 200 jiwa meninggal dunia, lahan pertanian, dan juga sebagian rumah warga yang ada di Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali mengalami kerusakan. Sejak 26 Oktober 2010 sampai dengan November 2010, Gunung Merapi yang aktif menunjukkan guguran kubah lava (wedhus gemberl, Jawa) yang terjadi hampir setiap hari. Jumlah serta letusannya semakin bertambah sesuai tingkat keaktifannya (Zamroni, 2011). Daerah di sekitar Gunung Merapi tentunya mempunyai sejumlah ancaman bencana yang harus selalu diwaspadai, karena setiap saat bisa terjadi bencana yang dapat menelan kerugian harta benda bahkan nyawa. Seperti yang terdapat di Desa Argomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yang berdekatan dengan Gunung Merapi mempunyai ancaman bencana lahar panas, awan panas, lahar dingin, dan wedus gemberl. Begitu juga dengan daerah yang ada di sekitar Desa Pakem, Kecamatan Kaliurang, Kabupaten Sleman-Yogyakarta, juga merupakan daerah yang berada di lereng Merapi (Zamroni, 2011).

Dilihat dari sumber mata pencahariannya, mayoritas masyarakat yang ada di sekitar Gunung Merapi berprofesi sebagai petani dan peternak dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pasca erupsi Gunung Merapi 26 Oktober 2010, sumber ekonomi masyarakat sebagai penopang kehidupan sehari-hari luluh lantak, bahkan sejumlah desa juga turut porak poranda (Zamroni, 2011). Dampak erupsi tentu saja tidak hanya bersifat materi atau korban nyawa saja. Akan tetapi bersifat kompleks, merambah pada hancurnya sistem sosial yang sudah dibangun di desa. Para pengungsi berusaha membangun sistem sosial yang baru di pengungsian secara cepat dan terkonsolidasi. Begitu

pula pada saat mereka kembali ke desa yang sudah porak poranda seperti di Desa Kinahrejo dan Desa Kaligendol - mereka berusaha membangun kembali sistem sosial dalam kehidupan di desa. Padahal, di dalam suatu desa komunitas sosial maupun komunitas keagamaan cukup beragam. Terdapat komunitas kejawen, komunitas santri maupun non santri. Masing-masing komunitas mempunyai epistemologi yang beragam dalam memandang dan memaknai bencana alam yang terjadi (Zamroni, 2011).

Sejarah membuktikan, pengalaman masyarakat Yogyakarta di dalam menghadapi bencana alam masa silam terbukti relatif lebih mampu melakukan pembenaan dan pembangunan se usai bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Faktor penting yang patut dicatat adalah karena dukungan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam konstruksi budaya lokal masyarakat dan bantuan dari berbagai pihak. Salah satu landasan filosofi terkait dengan kearifan lokal masyarakat Yogyakarta adalah "Memayu Hayuning Bawana" (menghiasi dunia). Narasi Memayu Hayuning Bawana ini terealisasikan dengan Hamemasuh Memalaning Bumi. Tafsir atas nilai filosofis mengenai bencana atau "Memalaning Bumi" tersebut dapat berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Di dalam kerja sosial masyarakat Jawa mengenal filosofi *sepi ing pamrih rame ing gawe* (tidak mementingkan diri, giat bekerja). Ini merupakan ungkapan kunci bagi gaya hidup Jawa dengan sikap dan perilakunya yang mengedepankan sikap *nrimo*, sabar, waspada-eling, andhap asor dan prasaja (Mulderm 1983 dalam Zamroni, 2011). Dalam masa tanggap darurat Merapi tahun 2010, solidaritas sosial orang Jawa tersebut dapat diamati secara jelas dan nyata. Rakyat bergerak lebih cepat daripada pemerintah. Ini artinya komunitas

lokal lebih mempunyai kecerdasan lokal dan lebih cepat tanggap dibandingkan dengan pemerintah.

Dalam filsafat Hangengasah Mingising Budi menggambar upaya yang tidak berhenti untuk mempertajam budi/manusia sehingga dari waktu ke waktu dapat menyinergikan kehidupan manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan Tuhan-nya, sehingga dapat tercapai bebrayan agung, termasuk untuk melindungi atau melestarikan dunia seisinya. Ini adalah harmoni kehidupan masyarakat Jawa. Selain prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk memperoleh keselamatan hidup dalam aktivitas sosial yang dilakukan, mereka juga sering menggelar upacara selamatan. Selamet berarti gak ana apa-apa, tidak ada apa-apa (Geertz, 1983 dalam Zamroni, 2011). Dengan demikian keadaan ketentraman masyarakat diperbaruhi oleh ritual upacara selamatan dan kekuatan-kekuatan yang berbahaya dinetralisasikan (Susesno, 2003 dalam Zamroni, 2011).

Masyarakat lokal di daerah Srumbung dan Dukun juga mempunyai kearifan lokal dalam menanggulangi gunung meletus. “.....Di daerah Srumbung dan Dukun terdapat suatu kearifan lokal, ketika akan terjadi gunung meletus biasanya ada benang merah lurus yang mengarah pada Gunung Merapi. Benang merah tersebut bukanlah benang dari layang-layang yang putus dan kemudian membentang, akan tetapi benang merah yang menjadi pertanda akan adanya letusan gunung, karena jika benang layang-layang tidak panjang seperti benang yang merupakan pertanda akan terjadi letusan gunung. Jika dirunut, benang tersebut juga tidak ditemukan ujung-pangkalnya...” (Abdul Wahid dalam Zamroni, 2011).

Fenomena bencana yang terjadi di Bantul-Yogyakarta ketika hendak terjadi gempa, banyak hewan yang bersembunyi. Akan tetapi, tidak semua warga menyadari akan tanda tersebut, sehingga gempa tahun 2006 tersebut banyak sekali menelan korban nyawa \pm 6.000 jiwa. Warga Bantul baru menyadari tanda-tanda alam tersebut setelah terjadi gempa dan ribuan nyawa menjadi korban (Zamroni, 2011).

Terkadang kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi dalam membaca tanda-tanda akan terjadi bencana alam tidak bisa dirasionalkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Ini adalah bagian dari pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang perlu kita selidiki secara terus-menerus dan kita kembangkan untuk menjadikan masyarakat semakin meningkat kapasitasnya dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, dan menjadikan mereka semakin waspada (Zamroni, 2011). Jika kesadaran masyarakat akan bahaya gunung api cukup tinggi dan kesiapsiagaan terbangun dengan baik melalui berbagai macam nilai-nilai lokalitas, agama dan ilmu pengetahuan, maka sangat dimungkinkan korban erupsi gunung api akan jauh lebih kecil lagi.

2. Masyarakat Aceh

Kearifan lokal yang sebenarnya sudah berkembang sebelum abad ke-20 mengenai kesiagaan bencana, khususnya menghadapi bencana gempa dan tsunami dalam sebuah kitab Tasawuf yang ditulis seorang ulama abad ke-18, tuntunan agar melihat gejala alam dengan baik saat usai terjadi gempa ditulis dengan jelas. Namun, naskah-naskah kuno itu tidak lagi dilestarikan dan dipedulikan, sehingga generasi masa kini seperti

kehilangan pegangan mengenai apa saja sebenarnya kearifan lokal Aceh. Kearifan lokal masyarakat Aceh dalam mitigasi bencana banjir, gempa bumi, angin, kebakaran, dan efek rumah kaca tercermin dari keunikan *rumoh Aceh* yang mampu beradaptasi dengan situasi alam sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana atau mengurangi dampak bencana.

Konstruksi bangunan khas *rumoh Aceh* berbentuk rumah panggung. Konstruksi *rumoh Aceh* dibangun dengan menyesuaikan kondisi alam yang berada di kawasan hutan tropis. Hal ini ditujukan untuk menghindari bencana banjir dan menghindari ancaman binatang buas seperti harimau. Selanjutnya, struktur *rumoh Aceh* terdiri dari tiga komponen yang membuat kokoh: Pertama, terletak pada pondasi pusat beban bangunan yang besar; Kedua, tiang dan balok menjadi tumpuan setiap konstruksi; Kemudian, komponen lainya rangka atap yang menjadi penyangga dari atas.

Karena konstruksinya elastis dan saling mengunci, antara lantai dan tiang diikat dengan pasak tanpa menggunakan paku serta membentuk *rigid* (kotak tiga dimensional yang utuh). Sehingga, dengan struktur yang demikian jika terjadi getaran atau goyangan akibat gempa bumi, struktur bangunan ini mengikuti arah gerakan, hanya terombang ambing baik ke kiri maupun ke kanan. Setelah goyangan berhenti, *rumoh Aceh* akan kembali normal sehingga tidak terjadi kerusakan (*merdeka.com* dalam Suryana, 2016).

Selain itu, *rumoh aceh* beratapkan rumbia dan terbuat dari kayu pilihan yang bisa bertahan ratusan tahun. *Rumoh Aceh* memiliki banyak jendela dan celah sehingga memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Hal ini sangat ramah terhadap efek buruk

rumah kaca dan membuat suasana dalam rumah adem dan nyaman untuk ditempati. Kemiringan atap *rumoh aceh* mencapai 70 derajat yang diikat menggunakan tali ijuk untuk mengikat ring balok sebagai tumpuan atap rumbia maupun untuk mengikat atap daun rumbia agar tidak terlepas di terpa angin. Selain itu, atap rumbia memiliki simpul utama yang berada di dekat balok memanjang yang tujuannya jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran, simpul utama dengan mudah bisa segera dilepaskan sehingga tidak menjalar ke elemen rumah lainnya.

Kelebihan lain yang dimiliki dari konstruksi *rumoh Aceh* adalah tidak memiliki bangunan apa pun dibawahnya. Seperti *escape building* (tempat penyelamatan tsunami), lantai dasar *rumoh Aceh* dibangun tanpa ada dinding, dan bila terjadi tsunami air bebas bergerak tanpa penghalang. Dengan konstruksi seperti itu ketika terjadi banjir perabotan rumah dan warga tidak perlu mengungsi. Cukup berada dalam rumah dan banjir berlalu tanpa ada benturan dengan air (*merdeka.com* dalam Suryana, 2016).

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi nilai-nilai, yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Aceh semakin lama semakin hilang dari generasi ke generasi. Dapat kita lihat dalam pembangunan yang semakin moderen menyebabkan keberadaan *rumoh Aceh* semakin menyusut digantikan dengan rumah-rumah beton dengan arsitektur yang lebih modern yang jauh dari prinsip-prinsip rumah tahan bencana (Suryana, 2016).

3. Masyarakat Mentawai.

Kearifan lokal Mentawai menghadapi bencana gempa terdapat pada sebuah lagu yang berjudul Teteu Amusiat Loga (gempa akan datang tupai sudah menjerit). Lagu ini sering disenandungkan anak-anak Mentawai, saat bermain gasing dari batang bakau atau manggis hutan, juga oleh anak-anak perempuan saat main petak umpet, maupun orang dewasa. Namun, hampir semuanya tidak memahami makna lagu yang dinyanyikan, malah beranggapan ini lagu biasa saja. Kalimat teteu ini bisa diartikan untuk kakek dan bisa juga diartikan gempa bumi (Nugroho, 2011).

Menurut kepercayaan masyarakat Mentawai yang beraliran Arat Sabulungan, Teteu adalah salah satu penguasa bumi, jika Sang Teteu murka maka Dia akan menggoncangkan bumi hingga mengeluarkan gempa. Tapi, sebelum gempa itu datang beberapa pertanda disampaikan oleh binatang, seperti tupai akan gelisah begitu juga dengan ayam peliharaan akan berkotek tanpa sebab. "Itu adalah sinyal akan datang gempa bumi,". Lagu ini tak ubahnya seperti *early warning system* yang bersifat kultural bagi masyarakat yang mendiami kepulauan terluar di Sumbar tersebut (Nugroho, 2011).

Tentang tsunami itu sudah ada sejak dulu, masyarakat Mentawai menyebut, *koat sitalu polak* (ombak besar). Supaya para cucu mereka ingat bahwa ada bencana alam yang besar, maka *sapunuteteuta siburu* (nenek moyang) menciptakan lagu tersebut. Para nenek moyang telah memberikan wasiat dengan lagu tersebut. Hanya saja, lagu tersebut tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Karena ini sudah berlalu dalam waktu lama, para orang tua sudah banyak yang lupa (Nugroho, 2011).

Ada juga cerita rakyat yang sudah dilupakan artinya, seperti Bakkat Minuang yang menceritakan tentang terbentuknya Selat Sikakap yang memisahkan Pagai Utara dan Pagai Selatan, 'Pulau Beriloga' sebuah pulau yang bergeser. Kearifan Mentawai lainnya adalah aturan tak tertulis yang mengimbau masyarakatnya untuk mendiami kawasan hulu sungai, berada di ketinggian, dan menggantungkan hidup sebagai peladang. Masyarakat Mentawai tak dianjurkan bekerja sebagai nelayan. Namun, kebijakan pemerintah 40 tahun silam lah yang 'memaksa' masyarakat adat Mentawai migrasi ke bibir pantai. Terbukti, saat bencana menghampiri Mentawai 25 Oktober 2010 lalu, gempa dan tsunami memporak-porandakan kawasan pantai barat Pulau Pagai, dan Sipora. Ratusan orang menjadi korban keganasan gelombang tsunami (Nugroho, 2011).

Penutup

Bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia, memberikan pembelajaran dalam melaksanakan program pengurangan risiko bencana (PRB). Hal tersebut terlihat dengan bergesernya paradigma bencana yang berfokus pada tanggap darurat menjadi mitigasi bencana. Mitigasi/PRB esensinya pada serangkaian aktivitas mengurangi risiko bencana (dampak bencana). Empat kerangka konseptual dari PRB yaitu: *awareness, knowledge & development, public commitment*, dan *risk assessment*. Dengan membangun kesadaran PRB pada masyarakat, diharapkan terjadi perubahan perilaku dan budaya sehingga kapasitas masyarakat dapat meningkat.

Program-program yang dirancang dalam upaya PRB perlu memperhatikan dimensi demografis, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Program PRB adalah salah satu

bentuk kesadaran yang tinggi untuk menghargai eksistensi manusia yang merupakan bagian dari ratifikasi 168 negara termasuk Indonesia tentang *Hyogo Framework for Action* 2005-2015 (HFA), yang berkomitmen dalam penurunan secara berarti hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi, dan lingkungan karena bencana yang dialami oleh masyarakat dan negara. Keberhasilan rencana tersebut akan sangat tergantung pada komitmen politik dan keterlibatan aktif masyarakat luas termasuk perguruan tinggi sebagai salah *stakeholders* dalam rencana aksi yang dimaksud.

Salah satu prioritas aksi dalam HFA 2005-2015 adalah peringatan dini yang perlu digali terus menerus baik dari segi teknologi maupun budaya masyarakat setempat yang secara historis sudah mempunyai cara-cara penyelamatan. Sistem peringatan dini secanggih apapun sangat tergantung kesadaran masyarakatnya untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana. Akhirnya, kerentanan sosial-personal (psikososial) menjadi penting untuk dikaji dan ditingkatkan SDM-nya.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal terkait bencana yang sudah ada turun temurun. Ditambah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga tujuan penanggulangan bencana di Indonesia dapat terwujud, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PUSTAKA ACUAN

- Astuti, S. I., & Sudaryono, S. U. (2010). Peran Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Pengulangan Bencana*, 1(1).
- Daulay, P. (2013). Membangun Masyarakat Harmonis Berbasis Kearifan Lokal: dari Keseragaman Menuju Keberagaman. Retrieved February 1, 2017, from <https://utsurabaya.files.wordpress.com/2013/01/dame.pdf>
- Hilmi, E., Hendarto, E., Ritanti, & Sahri, A. (n.d.). Analisis Potensi Bencana Abrasi dan Tsunami di Pesisir Cilacap. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 3(1).
- Nugroho, E. (2011). Kearifan Lokal Mentawai Menghadapi Bencana Gempa. Retrieved from <http://prb-indo.blogspot.co.id/2011/02/kearifan-lokal-mentawai-menghadapi.html>
- Sarwidi. (n.d.). Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Berdasarkan Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Retrieved from https://www.academia.edu/7823991/PENANGGULANGAN_BENCANA_GUNUNG_MERAPI_BERDASARKAN_SISTEM_PENANGGULANGAN_BENCANA_NASIONAL
- Suryana. (2016). Kearifan Lokal "Rumoh Aceh." Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2016/01/02/kearifan-lokal-rumoh-aceh>
- Widayanti, A. R. W. (2013). Perubahan Pekerjaan Masyarakat sebagai Akibat dari Bencana. Studi Kasus: Kawasan Wisata Volcano Tour Gunung Merapi, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24(1), 19-34.

Zamroni, M. I. (2011). Islam dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 2(1).

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SURABAYA





1 1 4 1 4 2 . 0 2

Perpustakaan Universitas Surabaya



DWIPUTRA PUSTAKA JAYA

Star Safira - Nizar Mansion E4-14
Sidoarjo 61265

Telp : 085-58414756

e-mail : dwiputra.pustaka@gmail.com

ISBN : 978-602-6604-03-3



9 786026 604033

U
S
PET

15